

PARADIGMA ANTROPOSETRISME DI KALANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Fitriya Wulandari¹ Devina Syifa Salsabila²

Universitas Malahayati, Bandar Lampung

Email: fw0032900@gmail.com, salsabiladavinasyifa@gmail.com

Abstrak

Rangkaian bencana ekologis yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alamiah. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang masif telah memperlemah daya dukung lingkungan dan memperbesar risiko kebencanaan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan cara pandang antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam, serta memandang alam sebatas instrumen pemenuhan kepentingan ekonomi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang terbentuknya paradigma antroposentrisme di kalangan masyarakat Indonesia serta mengkaji upaya pergeseran paradigma menuju ekosentrisme sebagai alternatif etika lingkungan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber akademik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma antroposentrisme di Indonesia terbentuk melalui proses historis panjang yang dipengaruhi oleh warisan kolonial, orientasi pembangunan ekonomi, logika investasi yang profit oriented, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan dimensi ekologis. Pergeseran menuju paradigma ekosentrisme menuntut transformasi cara pandang manusia terhadap alam melalui pendekatan teologis, etis, dan struktural, dengan menempatkan alam sebagai bagian dari komunitas ciptaan

yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilindungi. Dengan demikian, paradigma ekosentrisme menjadi kerangka penting dalam merespons krisis ekologis dan membangun relasi manusia dan alam yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Antroposentrisme, Ekosentrisme,

A. PENDAHULUAN

Akhir tahun di Indonesia ditandai dengan rangkaian bencana alam yang melanda berbagai wilayah, khususnya di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Banjir, longsor, dan badai ekstrem kerap dipahami sebagai peristiwa alamiah semata. Namun, pemahaman tersebut menjadi problematis ketika kondisi ekologis wilayah terdampak menunjukkan degradasi lingkungan yang signifikan akibat alih fungsi hutan menjadi kawasan industri dan ekonomi ekstraktif. Dengan demikian, bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai fenomena alam murni, melainkan sebagai konsekuensi dari relasi manusia dan alam yang timpang.

Bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari kesalahan cara pandang (paradigma) manusia dalam memosisikan dirinya terhadap alam. Salah satu paradigma yang dianggap berkontribusi besar terhadap terjadinya krisis lingkungan adalah etika antroposentrisme. Paradigma ini membentuk pola pikir dan perilaku manusia, baik dalam relasinya dengan sesama manusia maupun dengan alam lingkungan.

Paradigma antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta dan menempatkan manusia sebagai satu-satunya entitas yang memiliki nilai intrinsik. Sementara itu, alam beserta seluruh isinya dipandang hanya sebagai objek atau sarana untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Cara pandang demikian mendorong perilaku eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam paradigma antroposentrisme, manusia ditempatkan sebagai entitas dengan nilai tertinggi, sehingga kepentingan manusia menjadi pusat dari seluruh pertimbangan moral. Hanya manusia yang dipandang memiliki nilai intrinsik, sedangkan seluruh unsur alam semesta lainnya memperoleh

nilai sejauh keberadaannya dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan manusia. Alam tidak dipandang sebagai subjek bermoral, melainkan sebagai sarana instrumental yang sah untuk dieksploitasi demi kepentingan manusia.

Cara pandang tersebut menempatkan manusia sebagai penguasa alam yang memiliki legitimasi moral untuk memperlakukan alam sesuai kehendaknya, termasuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa batasan etis yang memadai. Dalam perspektif ini, etika hanya berlaku dalam hubungan antarmanusia, sementara tuntutan akan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup dianggap berlebihan atau tidak relevan. Kewajiban manusia terhadap alam semata-mata dipahami sebagai turunan dari tanggung jawab moral terhadap sesama manusia.

Hubungan antara manusia dan alam dalam paradigma antroposentrisme bersifat instrumental dan egoistis, karena alam diperlakukan sebagai alat pemuas kepentingan manusia. Kepedulian terhadap lingkungan dilakukan bukan karena pengakuan atas nilai alam itu sendiri, melainkan sebatas untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dinilai baik apabila memberikan manfaat langsung bagi kepentingan manusia.

Orientasi yang menempatkan kepentingan manusia sebagai prioritas utama, khususnya kepentingan jangka pendek, mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara masif tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu akar penyebab munculnya berbagai krisis lingkungan. Oleh karena karakteristiknya yang sempit, instrumentalistik, dan berorientasi pada kepentingan manusia semata, paradigma antroposentrisme kerap dikategorikan sebagai etika lingkungan yang dangkal (*shallow environmental ethics*).

Secara historis, etika antroposentrisme berakar pada pemikiran filsuf klasik dan modern. Aristoteles, dalam *Politics*, menyatakan bahwa tumbuhan disediakan bagi binatang, dan binatang diperuntukkan bagi manusia.¹ Pandangan ini memperkuat gagasan hierarki makhluk hidup, di mana ciptaan yang lebih rendah dianggap ada demi kepentingan ciptaan yang lebih tinggi. Karena manusia dipandang sebagai makhluk paling

¹ Aristoteles, *The Politics*. (Middlesex: Penguin Books, 1986), hlm. 79

tinggi, manusia dianggap memiliki legitimasi untuk memanfaatkan seluruh ciptaan lain demi memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan data Global Forest Watch (GFW), Indonesia mengalami kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer lembap dalam kurun waktu 2002–2024. Selama periode tersebut, luas hutan primer lembap Indonesia menyusut sekitar 11 persen, yang setara dengan hilangnya 34 persen tutupan pohon dalam dua dekade terakhir. Hutan primer lembap merupakan ekosistem dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi serta memiliki fungsi ekologis yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan iklim.

Banjir yang terjadi di Sumatera dan gagalnya negara menjamin hak aman warga negara akibat degradasi dan konversi hutan primer lembap yang terus berlangsung dalam skala besar, sehingga menimbulkan tekanan serius terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta tingginya risiko bencana ekologis.

Deforestasi juga berkontribusi signifikan terhadap terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat bahwa sepanjang periode 2016–2025, deforestasi di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 1,4 juta hektare. Salah satu penyebab utama deforestasi adalah aktivitas ratusan perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) strategis di bentang alam Bukit Barisan, DAS Batang Toru di Sumatera Utara, DAS Krueng Trumon, Singkil, Peusangan, dan Tripa di Aceh serta DAS Aia Dingin di Sumatera Barat. Kerusakan hutan di wilayah hulu DAS secara signifikan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang pada akhirnya memperparah dampak banjir bandang dan longsor di wilayah hilir, rangkaian bencana tersebut merupakan indikasi dari krisis agraria dan krisis ekologis yang telah berlangsung dalam jangka panjang. Pemberian izin dan konsesi skala besar untuk sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dinilai telah mengakibatkan penggundulan hutan, perampasan wilayah adat, kerusakan fungsi hidrologis kawasan hulu, serta meningkatnya risiko bencana di wilayah hilir. Data juga menunjukkan ribuan konflik agraria dalam satu dekade terakhir, dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat termasuk provinsi dengan tingkat konflik tertinggi, yang berkorelasi dengan deforestasi masif akibat ekspansi perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Infid, Siti Khoirun Ni'mah, menegaskan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor utama tingginya laju deforestasi di Indonesia. Mengacu pada kajian Stockholm Environment Institute, selama dua dekade terakhir perluasan perkebunan sawit telah menyebabkan hilangnya sekitar sepertiga dari total kehilangan hutan, atau setara dengan ± 3 juta hektare. Meskipun Indonesia sempat menunjukkan penurunan deforestasi akibat sawit industri pada periode 2018–2022, di mana rata-rata deforestasi menurun menjadi sekitar 32.406 hektare per tahun, tren tersebut kembali meningkat sebesar 18 persen pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.²

Data tersebut menunjukkan bahwa cara pandang antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam, tercermin kuat dalam praktik pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Paradigma yang memandang alam semata-mata sebagai instrumen pemenuhan kepentingan manusia telah melegitimasi eksploitasi hutan secara masif, sering kali demi kepentingan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Akibatnya, kerusakan hutan, krisis iklim, konflik agraria, serta meningkatnya bencana ekologis menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar Bagaimana paradigma antroposentrisme terbentuk di masyarakat Indonesia dan bagaimana pergeserannya menuju ekosentrisme?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar belakang antroposentrisme di kalangan masyarakat Indonesia

Paradigma antroposentrisme di kalangan masyarakat Indonesia tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses historis, sosial, ekonomi, serta kebijakan pembangunan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Sejak masa kolonial, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diarahkan pada kepentingan ekstraksi dan eksploitasi guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan industri, baik untuk kepentingan

² <https://lestari.kompas.com/read/2026/01/05/220000286/11-juta-hektare-hutan-primer-indonesia-hilang-dalam-dua-dekade-terakhir>

kolonial maupun negara pascakemerdekaan. Pola pengelolaan tersebut mewariskan cara pandang yang menempatkan alam sebagai komoditas dan alat produksi, bukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan fungsi ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya.

Dalam perkembangannya, paradigma ini terus direproduksi melalui kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan investasi. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pembangunan sering kali mendorong manusia untuk mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia cenderung lebih menitikberatkan pada upaya menarik investasi sebesar-besarnya, sehingga eksploitasi sumber daya alam dipandang sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, sumber daya alam lebih dipahami dalam kerangka *economic sense*³, yakni sebagai modal pembangunan dan sumber keuntungan ekonomi, sementara dimensi *ecological and sustainable sense* belum menjadi pertimbangan utama dalam perumusan maupun implementasi kebijakan.

Kondisi tersebut membentuk dan memperkuat pola pikir antroposentris di tengah masyarakat, di mana keberhasilan pembangunan kerap diukur dari capaian ekonomi semata, tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan dan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Paradigma ini secara tidak langsung melegitimasi praktik eksploitasi alam yang berlebihan serta menempatkan kepentingan manusia khususnya kepentingan ekonomi jangka pendek sebagai prioritas utama. Dengan demikian, latar belakang terbentuknya paradigma antroposentrisme di Indonesia tidak hanya bersumber dari faktor budaya atau kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kedua faktor berikut ini :

a. Warisan Historis Eksploitasi Sumber Daya Alam

Indonesia sejak lama dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Tanah yang subur serta sumber daya alam yang berlimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu kawasan yang strategis dan bernilai tinggi. Kondisi tersebut sejak masa lampau menjadikan Indonesia sebagai target ekspansi negara-negara Eropa dan Barat, yang datang dengan tujuan utama memanfaatkan kekayaan alam

³ Mas Achmad Sentosa, Prosiding Lokakarya *Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: ICEL, 1999), hlm. iii.

melalui pembukaan lahan dan pengembangan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Praktik eksploitasi ini membentuk pola pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mengesampingkan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun secara formal masa kolonialisme di Indonesia telah berakhir seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, dampak kolonialisme tersebut masih terasa hingga saat ini. Hal ini tercermin dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang, secara tidak disadari, masih memandang Barat khususnya bangsa kulit putih sebagai simbol superioritas dalam berbagai aspek kehidupan (Utami, 2021; Alawi, 2020; Jusuf & Hasan, 2018). Pandangan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek budaya dan identitas, tetapi juga berdampak pada cara masyarakat dan negara memandang pembangunan, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam. Superioritas Barat yang terinternalisasi ini berkontribusi pada reproduksi pola pikir yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi demi kemajuan dan kepentingan manusia.

Dalam konteks kontemporer, praktik kolonialisme tidak lagi diwujudkan melalui pendudukan wilayah secara politik dan militer. Sebaliknya, relasi kuasa tersebut bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih halus melalui mekanisme neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Neo-kolonialisme merujuk pada keberlanjutan pengaruh negara-negara eks-kolonial dalam sistem politik dan ekonomi negara bekas jajahan, meskipun secara formal tidak lagi menguasai wilayah tersebut. Sementara itu, neo-imperialisme berkaitan dengan dominasi negara-negara berkembang oleh kekuatan ekonomi kapitalis global, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat (Ashcroft et al., 2007).

Praktik neo-imperialisme tidak hanya beroperasi melalui pengaruh budaya dan gaya hidup, tetapi juga melalui eksploitasi sumber daya alam yang dilegitimasi oleh kepentingan ekonomi global. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di negara berkembang kerap dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuatan modal dan pengaruh besar, sehingga memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang mengeksploitasi dan masyarakat lokal. Dampak dari praktik ini tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga hilangnya ruang hidup dan tergerusnya kedaulatan ekologis masyarakat.

Fenomena eksploitasi alam akibat relasi kuasa tersebut juga banyak direpresentasikan dalam karya sastra Indonesia, seperti *Lemah Tanjung*

karya Ratna Indraswari Ibrahim (2003) dan *Si Anak Pemberani* karya Tere Liye (2021). Kedua karya tersebut menggambarkan bagaimana alam mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, sekaligus merefleksikan ketimpangan relasi antara manusia, kekuasaan, dan lingkungan. Representasi ini memperkuat pemahaman bahwa krisis lingkungan tidak semata-mata persoalan ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan warisan kolonial, relasi kuasa, dan paradigma antroposentris yang masih mendominasi hingga saat ini.⁴

b. Kebutuhan Ekonomi

Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat telah menjadi salah satu faktor dominan yang membentuk relasi manusia dengan alam, kebutuhan ekonomi tersebut tidak hanya dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas fiskal, serta peningkatan daya saing nasional di tengah arus globalisasi. Orientasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi ini secara perlahan namun pasti mendorong pergeseran cara pandang manusia terhadap alam, dari yang semula dipahami sebagai ruang hidup bersama menjadi sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi. Dalam kerangka inilah paradigma antroposentrisme menemukan momentumnya, karena menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan sekaligus pemilik otoritas penuh atas alam dan seluruh isinya.⁵

Kebijakan arah pembangunan yang lebih menekankan pada upaya menarik investasi, baik domestik maupun asing. Pemerintah, dalam berbagai periode pembangunan, kerap memandang investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam sering kali dirancang dengan memberikan kemudahan perizinan, relaksasi regulasi lingkungan, serta berbagai insentif fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan minat investor. Dalam situasi seperti ini, sumber daya alam lebih banyak dipahami dalam kerangka *economic sense*, yakni sebagai aset ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah, devisa, dan keuntungan finansial. Perspektif

⁴ Prabawati, T. S., & Sudibyo. (2023). *Imperialisme ekologis dalam cerpen "Barapen Nisan" karya Wika G. Wulandari: Kajian ekokritik poskolonial*. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 13(3), 189–196.

⁵ Sutoyo. (2013, July). *Paradigma perlindungan lingkungan hidup*.

ini, pada saat yang sama, cenderung mengabaikan dimensi *ecological sense* dan *sustainable sense* yang menempatkan keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan lingkungan sebagai prasyarat utama pembangunan jangka panjang.

Rendahnya perhatian terhadap aspek ekologi dalam kebijakan dan praktik investasi tidak dapat dilepaskan dari pola pikir investor yang masih dominan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Dalam logika kapitalisme modern, keberhasilan investasi diukur terutama dari besaran laba dan kecepatan pengembalian modal. Aspek perlindungan lingkungan sering kali dipandang sebagai beban biaya tambahan yang berpotensi mengurangi tingkat keuntungan. Pandangan semacam ini menyebabkan komitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan cenderung bersifat normatif dan administratif semata, tanpa diikuti dengan implementasi yang sungguh-sungguh di lapangan. Akibatnya, berbagai proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, seperti pembukaan hutan secara masif, alih fungsi lahan tanpa perencanaan ekologis yang memadai, serta eksploitasi kawasan hulu dan daerah tangkapan air.

Kondisi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap meningkatnya kerentanan ekologis di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Sumatra dan Provinsi Aceh. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi, hutan hujan tropis yang luas, serta fungsi ekologis strategis sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan tersebut juga menjadi sasaran utama ekspansi industri berbasis sumber daya alam, seperti perkebunan skala besar, pertambangan, dan proyek infrastruktur. Ekspansi tersebut kerap dilakukan dengan mengabaikan karakteristik ekologis wilayah, termasuk topografi, struktur tanah, dan fungsi hidrologis kawasan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu secara signifikan.

Berbagai peristiwa kebencanaan ekologis yang terjadi di Sumatra dan Aceh, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan degradasi daerah aliran sungai, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam yang bersifat alamiah. Sebaliknya, bencana-bencana tersebut merupakan manifestasi dari krisis ekologis yang bersumber dari praktik pembangunan yang eksploitatif dan berorientasi antroposentris. Kerusakan hutan di kawasan hulu, misalnya, menyebabkan hilangnya fungsi resapan air dan meningkatnya limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Kondisi ini

memperbesar risiko banjir dan longsor yang pada akhirnya berdampak langsung pada kehidupan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, bencana yang terjadi tidak hanya mencerminkan kegagalan manusia dalam mengelola alam secara berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis.

Dalam perspektif yang lebih luas, dominasi paradigma antroposentrisme dalam kebijakan pembangunan dan investasi juga berkaitan erat dengan warisan kolonial dan logika neo-imperialisme ekonomi. Sejak masa kolonial, wilayah-wilayah seperti Sumatra dan Aceh telah diposisikan sebagai ruang ekstraksi sumber daya alam untuk kepentingan pasar global. Pola ini tidak sepenuhnya berubah dalam era pascakolonial, melainkan bertransformasi dalam bentuk baru melalui mekanisme investasi global dan dominasi ekonomi kapitalis. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya alam sering kali dilegitimasi atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sementara dampak ekologis dan sosialnya ditanggung oleh masyarakat lokal. Paradigma antroposentrisme berfungsi sebagai landasan ideologis yang membenarkan praktik tersebut, karena menempatkan kepentingan manusia terutama kepentingan ekonomi jangka pendek sebagai prioritas utama.

Rendahnya apresiasi terhadap perlindungan lingkungan juga mencerminkan lemahnya integrasi nilai-nilai ekologis dalam sistem pengambilan keputusan, baik di tingkat kebijakan maupun praktik bisnis. Penilaian dampak lingkungan sering kali diperlakukan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai instrumen substantif untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Dalam banyak kasus, rekomendasi teknis terkait perlindungan lingkungan diabaikan atau dinegosiasikan demi kepentingan investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang dianut masih sangat antroposentris, karena mengutamakan kepentingan manusia sebagai pelaku ekonomi, sementara alam diposisikan sebagai objek yang dapat dikompromikan.

Dampak jangka panjang dari dominasi paradigma ini tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan meningkatnya frekuensi bencana, tetapi juga menciptakan ketidakadilan ekologis. Masyarakat lokal, yang bergantung langsung pada keberlanjutan lingkungan untuk kehidupan sehari-hari, sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kerusakan ekosistem. Di sisi lain, keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, termasuk investor dan

korporasi besar. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa paradigma antroposentrisme tidak hanya bermasalah secara ekologis, tetapi juga secara sosial dan etis.

Kebencanaan yang terjadi di Sumatra dan Aceh dapat dipahami sebagai peringatan atas kegagalan paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Selama sumber daya alam terus dipahami semata-mata dalam kerangka *economic sense* dan selama orientasi investasi masih didominasi oleh logika keuntungan jangka pendek, maka risiko kerusakan lingkungan dan bencana ekologis akan terus meningkat. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk melakukan refleksi kritis terhadap paradigma antroposentrisme yang selama ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta mendorong pergeseran menuju paradigma ekosentrisme yang menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilindungi.

2. Upaya Menuju Ekosentrisme

Paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dan ukuran utama dalam relasi dengan alam telah lama mendominasi cara pandang masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Dalam paradigma ini, alam dipahami terutama sebagai objek yang tersedia untuk dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Cara pandang tersebut tidak hanya membentuk sikap individual, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam kebijakan pembangunan, sistem ekonomi, dan praktik pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, relasi manusia dengan lingkungan cenderung bersifat instrumental, eksploitatif, dan jangka pendek, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap semakin memburuknya krisis ekologis.

Sebagai respons atas keterbatasan dan dampak destruktif paradigma antroposentrisme, teologi ekosentrisme muncul sebagai pendekatan alternatif yang menawarkan kerangka pemikiran lebih inklusif dan berkeadilan terhadap seluruh ciptaan. Paradigma ini menolak pandangan bahwa hanya manusia yang memiliki nilai moral, serta menegaskan bahwa alam dan seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang melekat pada keberadaannya. Dengan demikian, alam tidak lagi dipandang semata-mata

sebagai alat bagi kesejahteraan manusia, melainkan sebagai bagian dari komunitas kehidupan yang harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan.⁶

Dalam perspektif teologi ekosentrisme, relasi antara manusia, alam, dan Tuhan dipahami secara holistik. Jürgen Moltmann, salah satu pemikir teologi kontemporer yang banyak berkontribusi dalam pengembangan teologi ekologi, menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam sejarah manusia, tetapi juga berdiam dan bekerja dalam seluruh ciptaan. Pandangan ini secara tegas menolak dualisme antara manusia dan alam yang selama ini menjadi dasar pembenaran eksploitasi lingkungan. Bagi Moltmann, bumi dan seluruh isinya harus dipahami sebagai suatu “komunitas ciptaan” (*community of creation*), di mana setiap unsur memiliki peran dan martabatnya masing-masing⁷.

Konsep komunitas ciptaan menempatkan manusia bukan sebagai penguasa mutlak atas alam, melainkan sebagai bagian dari jaringan relasi ekologis yang saling bergantung. Dalam kerangka ini, keunggulan rasional manusia tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang, melainkan harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk merawat dan melindungi ciptaan. Pergeseran pemahaman ini menjadi fondasi penting dalam upaya beralih dari paradigma antroposentrisme menuju ekosentrisme.

Peralihan paradigma tersebut tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses refleksi kritis dan transformasi yang berlapis. Salah satu langkah awal yang fundamental adalah rekonstruksi pemahaman teologis dan etis mengenai posisi manusia di tengah alam. Doktrin keagamaan, yang selama ini sering ditafsirkan secara antroposentris, perlu dibaca ulang dengan pendekatan ekologis. Teks-teks keagamaan tidak lagi ditafsirkan sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam, tetapi sebagai panggilan untuk hidup selaras dengan ciptaan dan menjaga keseimbangan ekologis.

Dalam konteks ini, teologi ekosentrisme menuntut pendekatan multidimensional. Pemahaman tentang komunitas ciptaan tidak dapat dibangun hanya melalui satu disiplin ilmu atau satu tradisi pemikiran. Sebaliknya, diperlukan integrasi antara tradisi teologis, pengalaman hidup

⁶ Anne Marie Dalton, *A Theology for the Earth: The Contribution of Thomas Berry and Bernard Lonergan* (Ottawa: University of Ottawa Press, 1999), hlm. 130

⁷ Ibid., hlm. 4-5.

masyarakat, temuan ilmu pengetahuan modern, kebijaksanaan lokal, intuisi moral, serta refleksi rasional. Pendekatan yang integratif ini memungkinkan terbentuknya kesadaran ekologis yang lebih komprehensif dan kontekstual, terutama dalam menghadapi kompleksitas krisis lingkungan kontemporer.

Selain pada tataran konseptual dan teologis, pergeseran dari antroposentrisme ke ekosentrisme juga menuntut transformasi pada level etika individual. Paradigma ekosentrisme mendorong perubahan cara manusia memandang dan memperlakukan alam dalam kehidupan sehari-hari. Pola konsumsi yang eksploitatif dan berorientasi pada pemenuhan hasrat perlu digantikan dengan gaya hidup yang lebih sederhana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kesadaran bahwa setiap tindakan manusia memiliki dampak ekologis menjadi dasar bagi lahirnya etika lingkungan yang menempatkan kepentingan alam sejajar dengan kepentingan manusia.

Namun demikian, perubahan pada level individu saja tidaklah cukup. Paradigma antroposentrisme telah tertanam kuat dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, sehingga upaya pergeseran menuju ekosentrisme juga harus menyentuh dimensi struktural. Dalam konteks pembangunan nasional, paradigma ekosentrisme menuntut perubahan orientasi kebijakan yang selama ini terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan. Pembangunan tidak lagi dapat diukur semata-mata dari peningkatan investasi, ekspansi industri, atau eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keadilan ekologis, dan keberlanjutan jangka panjang.

Pergeseran paradigma ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, namun sekaligus rentan terhadap bencana ekologis. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan eksploitasi kawasan hulu sungai yang tidak terkendali telah memperparah risiko banjir, tanah longsor, dan degradasi ekosistem di berbagai wilayah. Dalam banyak kasus, kebijakan pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek dan investasi, sementara aspek perlindungan lingkungan ditempatkan sebagai pelengkap semata. Paradigma ekosentrisme menawarkan kritik mendasar terhadap praktik tersebut dengan menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis bukan hambatan pembangunan, melainkan prasyarat bagi kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri.

Lebih jauh, paradigma ekosentrisme juga membuka ruang bagi pengakuan dan penguatan kebijaksanaan lokal masyarakat adat dan komunitas tradisional. Dalam banyak praktik lokal, alam tidak dipahami sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki relasi spiritual, kultural, dan ekologis dengan manusia. Nilai-nilai tersebut sering kali terpinggirkan oleh logika pembangunan modern yang antroposentris dan kapitalistik. Dengan mengintegrasikan kebijaksanaan lokal ke dalam kerangka ekosentrisme, upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan berkeadilan.

Dengan demikian, peralihan dari paradigma antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan proses transformasi yang bersifat menyeluruh, melibatkan perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak manusia terhadap alam. Transformasi ini tidak hanya menyangkut dimensi teologis dan etis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik. Paradigma ekosentrisme menuntut kesadaran bahwa krisis lingkungan bukan semata-mata persoalan teknis atau alamiah, melainkan refleksi dari krisis nilai dan cara pandang manusia terhadap ciptaan.

Pada akhirnya, ekosentrisme menawarkan pemikiran yang lebih adil dan berkelanjutan dalam membangun relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan menempatkan seluruh ciptaan dalam kesetaraan moral dan relasi yang saling bergantung, paradigma ini membuka jalan bagi terbentuknya peradaban yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis dan keadilan antar generasi. Dalam konteks Indonesia, pergeseran menuju paradigma ekosentrisme menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan krisis lingkungan dan memastikan masa depan kehidupan yang lebih harmonis bagi manusia dan seluruh ciptaan.

C. KESIMPULAN

Paradigma antroposentrisme di kalangan masyarakat Indonesia merupakan hasil dari proses historis, sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan yang berlangsung dalam jangka panjang. Warisan kolonial yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi ekonomi, dikombinasikan dengan orientasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan investasi, telah membentuk cara pandang yang memosisikan manusia sebagai pusat dan penguasa alam. Paradigma ini

memandang sumber daya alam terutama dalam kerangka *economic sense*, sementara dimensi ekologis dan keberlanjutan cenderung diabaikan.

Dominasi paradigma antroposentrisme tercermin dalam praktik pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif, pemberian izin dan konsesi skala besar, serta lemahnya perlindungan lingkungan. Dampak dari cara pandang tersebut terlihat nyata dalam meningkatnya degradasi lingkungan, konflik agraria, serta rangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Sumatra dan Aceh. Bencana banjir, longsor, dan kerusakan daerah aliran sungai menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi manusia dan alam yang timpang serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekosistem.

Sebagai respons atas keterbatasan paradigma antroposentrisme, ekosentrisme menawarkan pemikiran alternatif yang menempatkan seluruh ciptaan dalam kesetaraan moral dan mengakui nilai intrinsik alam. Melalui pendekatan teologis, khususnya pemikiran Jürgen Moltmann tentang komunitas ciptaan, ekosentrisme menolak dualisme manusia dan alam serta menegaskan tanggung jawab moral manusia untuk merawat dan melindungi lingkungan. Pergeseran menuju paradigma ekosentrisme menuntut perubahan menyeluruh, tidak hanya pada tataran kesadaran individu, tetapi juga pada struktur kebijakan, sistem ekonomi, dan orientasi pembangunan nasional.

Dengan demikian, peralihan dari paradigma antroposentrisme menuju ekosentrisme menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi krisis ekologis di Indonesia. Paradigma ekosentrisme memberikan landasan etis dan teologis yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan menempatkan alam bukan sekadar sebagai sarana pemenuhan kepentingan manusia, melainkan sebagai bagian integral dari komunitas kehidupan. Pergeseran paradigma ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya relasi manusia dan alam yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologis serta keselamatan generasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles, *The Politics*. (Middlesex: Penguin Books, 1986), hlm. 79

<https://lestari.kompas.com/read/2026/01/05/220000286/11-juta-hektare-hutan-primer-indonesia-hilang-dalam-dua-dekade-terakhir>

Nando, R. K., & Dewantara, J. A. (2023). Persepsi antroposentrisme Pancasila dan implikasinya dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).

Mas Achmad Sentosa, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: ICEL, 1999), hlm. iii

Prabawati, T. S., & Sudibyo. (2023). Imperialisme ekologis dalam cerpen “Barapen Nisan” karya Wika G. Wulandari: Kajian ekokritik poskolonial. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 13(3), 189–196.

Sutoyo. (2013, July). Paradigma perlindungan lingkungan hidup.

Anne Marie Dalton, *A Theology for the Earth: The Contribution of Thomas Berry and Bernard Lonergan* (Ottawa: University of Ottawa Press, 1999), hlm. 130

Ibid., hlm. 4-5